GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **27 Maret 2007**

Subyek : **Limbah** **Hari** : **Selasa**

Halaman : **4**

Masalah Limbah Tambang Ok Tedi PNG

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Audit Lingkungan

[JAKARTA] Pemerintah pusat diminta membentuk tim audit lingkungan dan sosial untuk mengkaji masalah pembuangan limbah pasir dan merkuri dari Ok Tedi Mining Limited (OTML) di Papua Nugini (PNG) melalui Sungai Fly yang merusak ekosistem dan menimbulkan penyakit kulit bagi masyarakat Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, dan Merauke.

Bupati Merauke, Papua, John Gubla Gebze mengemukakan hal itu dalam percakapan dengan *Pembaruan* melalui saluran telepon, Senin (26/3) sore, dari Merauke.

Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat diminta melakukan pembicaraan bilateral dengan Pemerintah PNG dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, termasuk pemberian kompensasi atas kerusakan lingkungan kehidupan masyarakat.

Dikatakan, pemerintah pusat harus bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah pembuangan limbah OTML melalui Sungai Fly yang masuk sebagian wilayah Indonesia. Jangan melakukan pembiaran terhadap masalah ini, karena rakyat di ujung timur negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menderita.

"Ini sebuah bencana nasional jangka panjang yang memusnahkan seluruh ekosistem dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Ancaman untuk bangsa Indonesia tidak hanya dari segi keamanan, politik, ekonomi, dan budaya, tapi kerusakan lingkungan pun tetap mendapat derajat perhatian yang sama. Kasus pencurian pasir untuk dijual ke Singapura sama nilainya dengan pembuangan limbah pasir dan merkuri dari pertambangan OTML di Sungai Fly," ujarnya.

Arwana PNG

Pembuangan limbah tambang Ok Tedi melalui Sungai Fly sudah dirasakan dampak negatifnya oleh masyarakat di tiga kabupaten. Air sungai tidak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka yang mandi di sungai, menderita penyakit kulit. Limbah tersebut membuat biota sepanjang Sungai Fly mati. Bahkan laut di Pantai Selatan Papua mulai tercemar akibat limbah tersebut.

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat jangan terus mendiamkan masalah Ok Tedi sebab dalam pertemuan mengenai soal perbatasan, masalah ini sudah diungkapkan. Namun, tidak mendapatkan perhatian yang serius.

Pemerintah pusat hanya membicarakan masalah politik, keamanan, ekonomi, kebudayaan dan melupakan kerusakan lingkungan hidup di kawasan perbatasan di setiap sudut NKRI.

Padahal, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan negara tetangga harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia.

"Merusak lingkungan hidup itu sama dengan merusak Tanah Air. Kalau Tanah Air kita dirusak dengan pembuangan limbah melalui Sungai Fly berarti merusak fundamental kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kasus tersebut harus segera diselesaikan dalam pembicaraan bilateral sampai kepada kompensasi ganti rugi," tandasnya.

Diungkapkan, akibat pem- buangan limbah tersebut, pihaknya menolak ikan arwana asal PNG yang dipasarkan ke Papua. Alasannya, ikan arwana dari PNG diduga tercemar limbah.

"Hal itu sudah kita sampaikan saat pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke beberapa waktu lalu. Mereka menyadari adanya dugaan ikan arwana asal PNG tercemar limbah tambang Ok Tedi. Sampai sekarang mereka tidak memasarkannya ke Merauke lagi," katanya. [GAB/W-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup